

BAB III

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. DESKRIPSI KABUPATEN SLEMAN

1. Letak Wilayah

Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang memiliki posisi strategis yang menjadi penghubung Kota Yogyakarta dengan Magelang Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Sleman terletak diantara $110^{\circ} 33' 00''$ dan $110^{\circ} 13' 00''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I. Yogyakarta.

2. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.¹

¹ <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>

3. Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)	Jml Penduduk (jiwa)	Kepadatan (Km2)
		Desa	Dusun			
1	Moyudan	4	65	2.762	33.595	1,216
2	Godean	7	57	2.684	57.245	2,133
3	Minggir	5	68	2.727	34.562	1,267
4	Gamping	5	59	2.925	65.789	2,249
5	Seyegan	5	67	2.663	42.151	1,583
6	Sleman	5	83	3.132	55.549	1,774
7	Ngaglik	6	87	3.852	65.927	1,712
8	Mlati	5	74	2.852	67.037	2,351
9	Tempel	8	98	3.249	46.386	1,428
10	Turi	4	54	4.309	32.544	0,755
11	Prambanan	6	68	4.135	44.003	1,064
12	Kalasan	4	80	3.584	54.621	1,524
13	Berbah	4	58	2.299	40.226	1,750
14	Ngemplak	5	82	3.571	44.382	1,243
15	Pakem	5	61	4.384	30.713	0,701
16	Depok	3	58	3.555	109.092	3,069
17	Cangkringan	5	73	4.799	26.354	0,549

	Jumlah	86	1.212	57.482	850.176	1,479
--	--------	----	-------	--------	---------	-------

4. Karakteristik Wilayah

a. Berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada, wilayah Kabupaten Sleman

terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu :

1. Kawasan lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan kota Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan (ringbelt) sampai dengan puncak gunung Merapi. Wilayah ini merupakan sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan gunung Merapi dan ekosistemnya;
2. Kawasan Timur yang meliputi Kecamatan Prambanan, sebagian Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Wilayah ini merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih;
3. Wilayah Tengah yaitu wilayah aglomerasi kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa.
4. Wilayah Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan Moyudan merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu serta gerabah.

b. Berdasar jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Sleman

dengan kota pelabuhan (Semarang, Surabaya, Jakarta). Jalur ini melewati wilayah Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, dan Gamping. Selain itu, wilayah Kecamatan Depok, Mlati dan Gamping juga dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri primer. Untuk wilayah-wilayah kecamatan merupakan wilayah yang cepat berkembang, yaitu dari pertanian menjadi industri, perdagangan dan jasa.

c. Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu kota Yogyakarta. Berdasar letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut :

1. Wilayah aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu). Karena perkembangan kota Yogyakarta, maka kota-kota yang berbatasan dengan kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Depok, Gamping serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik dan Mlati merupakan wilayah aglomerasi kota Yogyakarta.
2. Wilayah sub urban (wilayah perbatasan antar desa dan kota). Kota Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik terletak agak jauh dari kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan/arah kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan merupakan wilayah sub urban.
3. Wilayah fungsi khusus / wilayah penyangga (buffer zone). Kota Kecamatan Tempel, Pakem dan Prambanan merupakan kota pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya dan merupakan pendukung dan batas perkembangan kota ditinjau dari kota Yogyakarta.²

² <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/karakteristik-wilayah>

5. Jumlah dan Karakteristik Penduduk

Jumlah penduduk pada tahun 2011 tercatat sebanyak 1.125.369 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 559.302 jiwa (49,70%), perempuan 566.067 jiwa (50,30%) dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,73% dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 305.376

Penduduk Kabupaten Sleman sebagian besar berada pada rentang usia produktif 15-60 tahun. Struktur penduduk Kabupaten Sleman terlihat dalam tabel berikut:³

Struktur Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2011

No	Struktur Usia (tahun)	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Total
1	0 – 4	32.088	30.285	62.373
2	5 – 9	38.799	36.371	75.170
3	10 – 14	40.252	37.453	77.705
4	15 – 19	37.461	35.289	72.750
5	20 – 24	37.095	36.334	73.429
6	25 – 29	49.703	50.034	99.737
7	30 – 34	55.938	54.872	110.810
8	35 – 39	51.435	51.699	103.134
9	40 – 44	48.386	48.432	96.818
10	45 – 49	39.475	40.390	79.865

³ <http://www.slemankab.go.id/3274/kependudukan-demografi.slm>

11	50 – 54	32.822	34.389	67.211
12	55 – 59	26.945	26.944	53.889
13	60 – 64	17.862	19.636	37.498
14	65 – 69	16.253	18.349	34.602
15	70 – 74	13.219	16.037	29.256
16	75 ke atas	21.569	29.553	51.122
	Total	559.302	566.067	1.125.369

Jumlah Penduduk Kabupaten Kab. Sleman Menurut Kecamatan Th. 2011

No	Kecamatan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1	Kecamatan Gamping	47.343	47.530	94.873
2	Kecamatan Godean	37.362	37.890	75.252
3	Kecamatan Moyudan	18.394	19.396	37.790
4	Kecamatan Minggir	18.925	19.986	38.911
5	Kecamatan Seyegan	26.489	27.383	53.872
6	Kecamatan Mlati	48.732	49.136	97.868
7	Kecamatan Depok	65.787	64.872	130.659
8	Kecamatan Berbah	25.528	25.768	51.296
9	Kecamatan Prambanan	32.959	30.344	63.303
10	Kecamatan Kalasan	36.253	36.752	73.005

11	Kecamatan Ngemplak	30.449	31.476	61.925
12	Kecamatan Ngaglik	49.468	50.043	99.511
13	Kecamatan Sleman	34.182	35.072	69.254
14	Kecamatan Tempel	32.580	33.564	66.144
15	Kecamatan Turi	19.761	20.422	40.183
16	Kecamatan Pakem	18.857	19.504	38.361
17	Kecamatan Cangkringan	16.233	16.929	33.162
	Jumlah	559.302	566.067	1.125.369

Pada tahun 2011 sumber mata pencaharian penduduk Kabupaten Sleman terbesar bergerak di sektor pertanian yakni sebanyak 28,6% dan sektor jasa sebanyak 24,39%.

6. Capaian MDGs Kabupaten Sleman

Dalam konteks pencapaian tujuan pembangunan millennium (*Milenium Development Goals/MDGs*), capaian Kabupaten Sleman dibandingkan dengan capaian nasional:

Keterangan	Nasional		Sleman	
	Capaian 2006	Target 2015	Capaian 2009	Capaian 2010
Goal 1 : Menanggulangi tingkat kemiskinan dan kelaparan				
Garis kemiskinan nasional	16%	7,5%	11,45%	10,70%
1\$ per hari garis kemiskinan	7%	10%	-	-
Kekurangan gizi anak	26%	18%	10,85%	10,19%

Tidak cukup konsumsi kalori	64%	35%	7,7%	7,7%
Goal 2 : Mencapai pendidikan dasar secara universal				
Partisipasi s/d tingkat SMP	93%	100%	81%	81,71%
Partisipasi s/d tingkat SD	77%	100%	99,83%	100,73%
Goal 3 : Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan				
Partisipasi perempuan di tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK	100% 103% 100%	100%	APK Perempuan : SD (96,85%) SMP (102,71%) SMA (68,83%) APM Perempuan: SD (83,35%) SMP (72,66%) SMA (48,51%)	APK Perempuan : SD (115,10%) SMP (117,95%) SMA (79,86%) APM Perempuan : SD (99,76%) SMP (80,53%) SMA (55,07%)
Melek huruf anak usia 15-24 tahun	99% laki-laki & perempuan	100%	-	99,92%
Perempuan di bidang non pertanian	26%	50%	77,58%	77,42%
Perempuan di DPR	11%	50%	18%	18%
Goal 4 : Mengurangi tingkat kematian anak				

Kematian Balita	40 per 100.000 kelahiran hidup	32 per 100.000 kelahiran hidup	22,8 per 100.000 kelahiran hidup	43,13 per 100.000 kelahiran hidup (5 per 11.591 kelahiran hidup)
Imunisasi balita (lengkap dasar)	72%	90%	101,74%	108,5%
Goal 5 : Meningkatkan kesehatan ibu				
Rasio kematian ibu melahirkan	307 per 100.000 kelahiran hidup	100 per 100.000 kelahiran hidup	69,31 per 100.000 kelahiran hidup	112,16 per 100.000 kelahiran hidup (13 per 11.591 kelahiran hidup)
Kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan	73%	100%	89,34%	96,94%
Goal 6 : Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya				
Sebaran HIV	0,1%	Kurangi sebaran	59 kasus (6,91 per 100.000 penduduk)	209 kasus (19,1 per 100.000 penduduk)
Kasus TBC	262 per 100.000	Kurangi kasus	12 kasus (1,14 per 100.000 penduduk)	14 kasus (1,28 per 100.000 penduduk)

Kasus malaria	15-20 juta per tahun	Kurangi kasus	12 kasus (1,14 per 100.000 penduduk)	14 kasus (1,28 per 100.000 penduduk)
Goal 7 : Menjamin kelestarian lingkungan hidup				
Areal hutan	50%	Terdapat keberlanjutan	7,8%	5,52%
Nature conservation area	7%	Terdapat keberlanjutan	2,8%	2,82%
Akses air bersih	52%	67%	47,63%	92,1%
Fasilitas sanitasi	68%	65%	51,02%	95%

Sumber : Bappeda Sleman 2011

7. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, dikenal adanya indeks pembangunan gender (IPG). Indikator IPG Kabupaten Sleman Tahun 2010 sebagai berikut:⁴

No	Uraian	Nilai
Komponen IPG		
1.	Angka Harapan Hidup (tahun)	76,56
2.	Angka Melek Huruf (%)	89,40
3.	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,66
4.	Kontribusi Perempuan terhadap Pendapatan (%)	0,36
Indeks IPG		
1.	Kesehatan	85,93

⁴ <http://www.slemankab.go.id/3177/ipg-dan-inkesra.slm>

2.	Pendidikan	81,07
3.	Pendapatan	55,51
IPG		74,17

Perkembangan IPG Kabupaten Sleman tahun 2006, 2009 dan 2010



IPG Provinsi DI. Yogyakarta dan Kabupaten/Kota tahun 2009 – 2010

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Nilai IPG		Peringkat Nasional	
		2009	2010	2009	2010
1.	DI. Yogyakarta	72,24	72,51	2	2
2.	Kulon Progo	66,56	67,04	122	127
3.	Bantul	71,20	71,33	35	42
4.	Gunung Kidul	64,77	65,42	169	177
5.	Sleman	73,94	74,17	9	10
6.	Kota Yogyakarta	77,10	77,56	1	1

sumber : BPS Kab. Sleman

8. Kelembagaan Pemerintahan

Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman sesuai dengan Peraturan Daerah No.9 tahun 2009 adalah sebagai berikut :⁵

No	Nama Instansi
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Dinas Kesehatan (Dinkes)
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora)
5	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
6	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakertransos)
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
9	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
10	Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
12	Dinas Pasar
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
14	Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah
15	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
17	Badan Kepegawaian Daerah
18	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

⁵ <http://www.slemankab.go.id/profil/profil-pemerintah-kabupaten-sleman/kelembagaan>

19	Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Bangsa dan Penanggulangan Bencana
20	Inspektorat Kabupaten
21	Rumah Sakit Umum Daerah Sleman
22	Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan
23	Kantor Lingkungan Hidup
24	Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal
25	Kantor Pelayanan Perizinan
26	Kantor Perpustakaan Daerah
27	Kantor Arsip Daerah
28	Satuan Polisi Pamong Praja
29	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
30	Kecamatan

Sumber : Bagian Organisasi Kab. Sleman

9. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan organ di bawah BKBPMPP sebagai Kordinator Gugus Tugas KLA. Bidang PPPA mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 2) Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 3) Penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan perempuan.
- 4) Penyelenggaraan dan pembinaan perlindungan anak, dan

5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Subbidang yang ada di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

- 1) Subbidang Pemberdayaan perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pemberdayaan perempuan. Mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan rencana kerja subbidang pemberdayaan perempuan.
 - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan.
 - c) Penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan perempuan.
 - d) Penyelenggaraan dan pembinaan pengarusutamaan gender.
 - e) Penyelenggaraan pelayanan perlindungan perempuan, dan
 - f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja subbidang pemberdayaan perempuan.
- 2) Subbidang perlindungan anak mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina perlindungan anak. Mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan rencana kerja subbidang perlindungan anak.
 - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan anak.
 - c) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pelayanan perlindungan anak.
 - d) Penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan anak.
 - e) Penyelenggaraan dan pembinaan kelembagaan perlindungan anak, dan
 - f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja subbidang perlindungan anak.

B. KEBIJAKAN LAYAK ANAK (KLA)

1. Pengertian KLA

Kabupaten/Kota Layak Anak, selanjutnya disingkat dengan KLA adalah suatu sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.

2. Dasar Hukum

Berangkat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian disusul dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 serta sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak Anak) dan sebagai realisasi dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010; maka pada tahun 2011 dicanangkanlah Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang berada dibawah kendali tugas Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak.

Kebijakan KLA diawali dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (Permeneg PPAA) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA, disusul dengan Permeneg PPPA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan

KLA, Permeneg PPPA Nomor 13 Tahun 2011 tentang Indikator KLA, dan Permeneg PPPA Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi KLA.

3. Prinsip Pengembangan KLA

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Permeneg PPPA Nomor 11 Tahun 2011, Kebijakan Pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

4. Arahan Pengembangan KLA

Kebijakan Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

5. Strategi Pengembangan KLA

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Permeneg PPPA Nomor 11 Tahun 2011, Strategi Pengembangan KLA di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota berupa pengintegrasian hak anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

6. Tahapan Pengembangan KLA

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Permeneg PPPA Nomor 11 Tahun 2011, Tahapan Pengembangan KLA wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak. Adapun tahapan tersebut meliputi::

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;

- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Untuk mengefektifkan pengembangan KLA, dibentuk Gugus Tugas KLA yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur lembaga terkait, perwakilan anak, dan dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat.

7. Indikator KLA

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak dijelaskan tentang 31 indikator kabupaten layak anak yang mana setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator KLA.⁶

a. Penguatan kelembagaan

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak
2. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan
3. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya
4. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan

⁶ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA

5. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan
6. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak
7. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

b. Klaster hak anak;

b.1. Hak sipil dan kebebasan;

1. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
2. Tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
3. Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

b.2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

1. Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
2. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
3. Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;

1. Angka Kematian Bayi;
2. Prevalensi kekurangan gizi pada balita
3. Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif
4. Jumlah Pojok ASI
5. Persentase imunisasi dasar lengkap

6. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental
7. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan
8. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih
9. Tersedia kawasan tanpa rokok.

d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya

1. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini
2. Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun
3. Persentase sekolah ramah anak
4. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah
5. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

e. Perlindungan khusus.

1. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan
2. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*)
3. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak

4. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

C. KEBIJAKAN KLA DI SLEMAN

1. STRATEGI KEBIJAKAN KLA⁷

A. Latar Belakang KLA di Sleman

KLA di Sleman dilandasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan baik internasional maupun nasional, seperti UUD 45 pasal 28 ayat 2, UU. No4 thn 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU.no 3 thn 1997 tentang Pengadilan Anak, UU.no20 thn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU.no 23 thn 2002 tentang Perlindungan Anak, UU.no24 thn 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU.21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kemudian disusul dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PPPA) no 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kab./Kota Layak Anak. Jauh sebelumnya, PBB dalam Resolusi tanggal 10 Mei 2002 juga menghasilkan sebuah deklarasi *A World Fit For Children*

Indonesia lantas menindak lanjuti dengan IDOLA (Indonesia Layak Anak) melalui pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak di 100 Kabupaten/kota hingga tahun 2014. Pada akhir tahun 2010, Sleman menjadi Kabupaten ke 35 yang memperoleh dorongan dari Kementerian Negara PPPA

⁷ Bahan Acara Dialog Interaktif 'TERAS JOGJA' Jogja TV Senin 8 April 2013 dengan tema : Kebijakan Pemkab Sleman dalam Implementasi KLA'

menjadi salah satu Kabupaten percontohan dalam Pengembangan Kabupaten Layak Anak.

Sleman telah mencanangkan Menuju Kabupaten Layak Anak yang itu relevan dengan visi dan misinya, bersamaan dengan Puncak Acara Harganas dan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi DIY Juli tahun 2011 di lapangan Deggung Kabupaten Sleman.

B. Argumentasi KLA di Sleman

Berdasarkan data statistik, jumlah anak di Kabupaten Sleman sebanyak 1/3 dari total penduduk, yaitu 336.082 anak. Pentingnya KLA di Sleman berangkat dari beberapa argumen sebagai berikut:

1. Anak modal dan investasi SDM masa depan, sebagai generasi penerus bangsa.
2. Anak berkualitas tidak jadi beban pembangunan.
3. Pemenuhan hak anak di Sleman lewat strategi pengarusutamaan hak anak (PUHA) dengan implementasi Sleman menuju Kabupaten Layak Anak.
4. Kabupaten Sleman sudah menintegrasikan Isu 2 Gender dalam Visi Misi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja (Renja) sehingga SKPD dalam melaksanakan program-program dan kegiatan mengacu pada RPJMD tersebut.

Adapun visi Kabupaten Sleman : *Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir dan batin, berdaya saing, dan berkeadilan gender pada tahun 2015*'. Adapun misinya: 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang

baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dlm memberikan pelayanan prima bagi masyarakat; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat; 3. Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan; 4. Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup; 5. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang.

Komitmen dan statemen yang menyertai visi dan misi tersebut adalah: “Anak yang lahir di Sleman harus sehat dan cerdas secara alami” dan “Anak Sleman minimal berpendidikan SMA/SMK”. (wajar 12 tahun).

C. Pengembangan KLA di Sleman

Pengembangan KLA di Sleman mencakup bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Komitment Politis;
2. Mobilisasi Sumber Daya;
3. Pembentukan Gugus Tugas;
4. Pelaporan;
5. Pengumpulan Data Basis;
6. Pemantauan dan Evaluasi;
7. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)

2. IMPLEMENTASI KLA DI SLEMAN

KLA merupakan penerapan sistem pembangunan kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Sleman.

Sinergitas pembangunan dalam mewujudkan Sleman menuju KLA mencakup aktor seperti pemerintah pusat, media, pemerintah propinsi,

lembaga/ perguruan tinggi, satuan kerja perangkat daerah, NGO/LSM, masyarakat, dunia usaha/industri/perbankan.

Dalam implementasi pelaksanaan KLA, tahapan yang digunakan bersifat top down sekaligus bottom up. Disebut top down karena dimulai dari Resolusi MU PBB 'A World Fit For Children' yang kemudian dijalankan oleh Indonesia, provinsi, kabupaten/kota. Selain itu, tahapan KLA juga bersifat bottom up karena dilaksanakan di tingkat kabupaten dimana KLA diawali dengan adanya keluarga ramah anak, kemudian berlanjut ke Dasawisma, RT/RW, Dusun, Desa/Kelurahan, kemudian berlanjut ke kecamatan.

Layak anak adalah sebuah kondisi terpenuhinya hak-hak anak, yang terdiri atas 1. Hak Hidup; 2. Tumbuh kembang; 3. Perlindungan; 4. Partisipasi. Adapun 5 klaster hak anak mencakup : 1. Hak sipil dan kebebasan; 2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan; 4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; 5. Perlindungan khusus

Untuk menuju KLA, langkah langkah yang sudah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sleman sebagai berikut :

- Telah dibentuk Gugus Tugas KLA tingkat Kabupaten maupun di 17 Kecamatan
- Telah dibentuk Forum Anak Sleman (FORANS) tingkat Kabupaten maupun di 17 Kecamatan
- Telah dibentuk FPK2PA (Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak) di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan

- Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA Pemkab Sleman
- Sosialisasi KLA melalui berbagai media (TV, Radio, cetak)
- Membina jejaring , dengan berbagai kelembagaan yang responsif anak (LSM, perguruan tinggi, pengusaha)
- Menganangkan Kecamatan Layak Anak dan Desa Ramah Anak (7 desa di 7 Kecamatan) bersamaan dengan momentum kegiatan evaluasi baik tingkat kecamatan maupun tingkat propins

Implementasi KLA di Sleman meski baru mencapai dua tahun telah mendapatkan apresiasi berupa penghargaan, yaitu tingkat nasional yang dievaluasi oleh tim independen setiap tahun dengan 5 kriteria : Pratama, Madya, Nindya, Utama, KLA. Pada tahun 2011 Kabupaten Sleman mendapatkan apresiasi : Inovasi Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya (Pengembangan Klaster 4) kemudian pada tahun 2012 mendapatkan tingkat Pratama. Pada tahun tahun 2013 ini Kabupaten Sleman menyusun indikator evaluasi untuk Kecamatan Layak anak.

Adapun implementasi KLA oleh SKPD Kabupaten Sleman begitu beragam sebagai berikut:

1. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKB-PMPP). Badan ini melakukan kegiatan: a. Pelaksanaan sosialisasi terkait dgn kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; b. Kegiatan Polah (Kumpul Bocah) di 17 kecamatan; c. Pengembangan sistem informasi gender dan anak; d. Peringatan Hari Anak Nasional; e. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

(KRR); f. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kegiatan di masyarakat; g. Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah; h. Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu Padu.

2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil . Dinas ini melakukan kegiatan: a. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang catatan sipil; b.Fasilitasi akte kelahiran bagi keluarga miskin; c. Pada saatnya mengembangkan pelayanan Akte Kelahiran gratis bagi masyarakat Sleman
3. Dinas Budaya dan Pariwisata yang melakukan Dinas Budaya dan Pariwisata yang melakukan Apresiasi Seni Pedalangan (dalang cilik); Festival Kesenian Anak Sleman; Gelar seni upacara adat yang melibatkan kelompok anak; Sosialisasi Perda No. 22/1996 tentang usaha rekreasi hiburan umum yang melarang anak memasuki tempat hiburan malam; Monitoring tempat usaha game net saat jam belajar di sekolah; Dasilitas tempat bermain anak di tempat wisata Kaliurang; Pembinaan kepada pengusaha hotel dan restoran untuk memberi fasilitas ruang bermain untuk anak; Paket outbond Desa Wisata di Kabupaten Sleman; Pembinaan 25 Sanggar Seni Budaya; (MGM) sebagai media belajar anak
4. Kantor Perpustakaan Daerah yang menyediakan Pustaka Ramah Anak}; Taman Bacaan Masyarakat; Perpustakaan Desa; Perpustakaan Masyarakat; Perpustakaan Daerah; Perpustakaan Keliling
5. Kesbanglinmas dan Bencana Alam yang mengadakan kegiatan PHBB {Prilaku Hidup Berwawasan Bencana}; Forum Komunikasi Wawasan

Kebangsaan bagi generasi muda antar etnis dan suku; Pencegahan dini dalam bencana alam bagi anak/pelajar; Gladi Lapangan Anak Berkebutuhan Khusus bekerjasama dengan ASB

6. Dinas Kesehatan. Dinas ini mengupayakan {Layanan Kesehatan Ramah Anak yang melibatkan Pemerintah dan Swasta. Kegiatan tersebut mencakup:

a. Sosialisasi tentang HIV/AIDS pada kelompok resiko remaja dan masyarakat; b. Pengadaan sarana KIE; c. Sosialisasi Kespro di sekolah; d. Pembinaan peer counselor remaja; e. Pelatihan peer conselour bagi guru; f. Jambore Kespro; g. Promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); h. Poster ajakan ke Posyandu; i. Pembinaan SDIDTK di Posyandu integrasi dengan BKB dan PAUD; j. Program UKS dari TK sampai dengan SMA/K; k. Sosialisasi program imunisasi pada masyakat (KIE); l. Sosialisasi penyakit diare dan ISPA pada ibu balita;. m. Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah; n. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin bagi Ibu Hamil dan Balita; o. Puskesmas Ramah Anak; p. Pelayanan Psikolog Remaja di Semua Puskesmas